	News Title : Bappebti Sudah Tetapkan Kantor Bursa Kripto	
	Media Name : Beritasatu.com	**Journalist** : Lona Olavia / FMB
	Publish Date : 28 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kmeendag), Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama JFX), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Bursa Kripto

Home > Ekonomi

Bappebti Sudah Tetapkan Kantor Bursa Kripto

Selasa, 28 Desember 2021 | 11:18 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB



Ilustrasi Bitcoin. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah menetapkan kantor bagi pengembangan bursa *kripto* di The City Tower 2l. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi tersebut tidaklah mengherankan karena Digital Futures Exchange (DFX) memang beroperasional di sana.

"Iya betul di tempat tersebut, progress sedang proses persetujuan sebagai bursa berjangka dahulu sesuai Peraturan Bappebti (Perba) 1 tahun 1999 tentang perizinan bursa berjangka dan kliring berjangka diharapkan akhir tahun ini selesai. Dan selanjutnya sesuai Perba 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset *kripto*, maka PT tersebut harus melengkapi syarat sebagai bursa *kripto* dan diharapkan kuartal I-2022 bisa segera terwujud," ucap Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya kepada *Investor Daily*, Selasa (28/12/2021).

DFX sebagai bursa aset *kripto* di Indonesia, dikatakannya memang akan beroperasional pada kuartal I-2022. Namun, menurutnya bisa lebih cepat jikalau syarat-syarat untuk pendiriannya sudah lengkap semua, terutama dalam hal permodalan. Mengacu pada *beleid* yang disahkan pada awal tahun lalu tersebut, BAPPEBTI menyatakan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemain *kripto*. Di antaranya adanya bursa berjangka, pasar fisik aset *kripto*, lembaga kliring berjangka, pengelola tempat penyimpan aset *kripto*, pedagang fisik aset *kripto* harus memiliki modal Rp 1 triliun.

"Sebagai bursa berjangka seperti halnya ICDX dan JFX perlu modal Rp 100 miliar. Lalu sebagai bursa kripto harus jadi Rp 500 miliar dan 3 bulan kemudian harus jadi Rp 1 triliun," sebutnya.

BACA JUGA
Token Asli Indonesia Siap Ramaikan Bursa Kripto

Sementara itu, kehadiran bursa kripto DFX sangat diperlukan, supaya fokus dalam pengawasan transaksi dan pelaporannya. Realisasi DFX menjadi semakin menarik lantaran Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan meregulasi bursa khusus untuk aset kripto. Apalagi saat ini teknologi yang berkembang terutama dalam transaksi aset kripto yaitu *blockchain*. Oleh karena itu, Bappebti memisahkan transaksi aset *kripto* dan komoditas meski *kripto* masuk komoditas. Hal ini juga untuk hindari peretasan.

"Memberikan kepastian bagi pedagang atau investor yang jadi pedagang aset kripto di dalam negeri. Selama ini ada yang bergabung ke *exchanger* di luar, perilaku seperti pedagang, *marketplace* di dalamnya jual beli. Kalau ini kumpulkan pedagang (di bursa *kripto*), pedagang semua tercatat, transaksi kliring tercatat, pencairan dana ada di kliring," tegas Tirta.

Bappebti, sambungnya juga tengah menyiapkan self regulatory organization (SRO) sehingga ada kliring,kustodian, dan bank penjamin untuk pembentukan bursa *kripto*. "Kita yang pertama di dunia. Ada SRO terkait bursa *kripto*. Kalau di Asia, Singapura di sana melarang salah satu pedagang besar. Di Indonesia, diperbolehkan tetapi diatur," pungkasnya.

Adapun, ICDX dan JFX tetap sebagai bursa berjangka komoditi dan derivatif. Seperti diketahui, Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ICDX) berencana meluncurkan bursa untuk akomodasi perdagangan aset *kripto*. Sedangkan, Jakarta Future Exchange (FJX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan salah satu pemegang saham dari DFX.

BACA JUGA
Bappebti: Jaga Kepercayaan Masyarakat, Bursa Kripto Harus Terbentuk

"ICDX dan JFX agar fokus pada peningkatan transaksi perdagangan berjangka komoditi terutama multilateral. Kalau misalnya mau daftar jadi bursa *kripto*, maka sesuai Perba 8 Tahun 2021 khususnya pasal 5 ayat 4 di mana bursa berjangka yang mendapatkan persetujuan menyelenggarakan perdagangan *kripto* tidak dapat menyelenggarakan transaksi komoditi lainnya," tegasnya.

Meski demikian, Tirta menegaskan, PT DFX akan berdiri independen. Namun, dibawah pembinaan dan pengawasan Bappebti sesuai ketentuan perundangan UU dan PP Perdagangan Berjangka Komoditi.

Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang mengatakan, Bappebti baru-baru ini sudah melakukan *site visit* ke kantor DFX untuk mengecek kesiapan infrastruktur untuk operasional bursa *kripto*. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui keputusan resminya mengenai kapan waktunya untuk bursa *kripto* beroperasional. "Bappebti sudah cek fisik kantor dan infrastrukturnya, tinggal tunggu keputusannya saja. Di The City Tower, satu gedung dengan BBJ tapi beda lantai dan manajemennya juga berbeda. Dia (DFX) independen," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa saat ini Bappebti telah menyusun sejumlah kebijakan terkait perdagangan fisik aset *kripto* di Indonesia. Adapun, kebijakan yang telah disusun di antaranya pembentukan ekosistem kelembagaan pasar fisik aset *Kripto* yaitu bursa aset kripto, lembaga kliring dan pengelola tempat penyimpanan aset *kripto*. Kemudian, melakukan penetapan jenis aset *kripto* baru yang dapat diperdagangkan.

Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset *kripto* di Indonesia mencapai angka 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara, transaksi investasi *kripto* di Indonesia tembus Rp 478,5 triliun per Juli 2021 atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai transaksi di pasar *kripto* Indonesia rata-rata bisa capai Rp 1,7 triliun per hari.

Kehadiran bursa *kripto* di Tanah Air memang akan terwujud sebentar lagi. Pasalnya, Bappebti sudah mengadakan *fit and proper test* kepada calon dewan komisaris dan calon direksi bursa kripto, pada akhir November lalu. "Bursa untuk *kripto* sedang dalam proses verifikasi administrasi dan teknis," ucap Wisnu.